

**ANALISIS PERSEPSI PELAJAR DAN MASYARAKAT TERHADAP
JEMBATAN RUSAK SEBAGAI INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
PENDIDIKAN DAN DAMPAKNYA BAGI PELAYANAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN TANGGAMUS**

TUGAS INDIVIDU

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Metode Penelitian Administrasi Publik**

Dosen Pengampu:

Prof. Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D.



Oleh:

Maudy Aprilica B 2416041130

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia, sehingga negara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya sekadar kebutuhan individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta memastikan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat (Nurbaya et al., 2024). Sebagaimana dijelaskan oleh penelitian dari Palguna & Dwi Atmaja (2023), bahwa negara harus secara aktif menerapkan kebijakan publik yang mendorong terpenuhinya hak atas pendidikan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan kemajuan peradaban umat manusia.

Pemerataan pelayanan publik dalam sektor pendidikan merupakan landasan penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang merata (Mahardhani, 2025). Ketimpangan akses pendidikan di Indonesia masih terjadi, terutama karena keterbatasan infrastruktur pendidikan dan distribusi guru yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran serta kesempatan belajar siswa dari komunitas yang kurang beruntung (Afendi et al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran diperlukan agar layanan pendidikan dapat diakses secara adil oleh seluruh warga negara

Pentingnya infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, hingga infrastruktur pendukung lain seperti jalan ataupun jembatan penyebrangan menuju sekolah yang aman dan layak, memiliki peranan penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar (Juro et al., 2025). Sarana fisik yang memadai dapat menciptakan suasana belajar yang

nyaman, mendorong semangat peserta didik, dan mendukung efektivitas pembelajaran. Ketersediaan infrastruktur yang baik juga berpengaruh pada motivasi, ketekunan, serta prestasi akademik peserta didik

Namun pada kenyataannya, infrastruktur pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Ketimpangan akses pendidikan masih terlihat jelas, misalnya kondisi gedung sekolah yang tidak layak, keterbatasan ruang kelas, serta akses jalan dan jembatan yang rusak sehingga menyulitkan peserta didik menuju sekolah. Hambatan tersebut tidak hanya mengurangi kenyamanan belajar, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kehadiran, motivasi, bahkan capaian akademik siswa. Kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan sarana prasarana, sehingga tanpa dukungan infrastruktur yang memadai tujuan pemerataan pendidikan sulit untuk diwujudkan (Fadillah et al., 2025). Situasi ini menunjukkan pentingnya perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata agar seluruh anak bangsa dapat memperoleh hak pendidikan secara adil.

Akses ke sekolah di daerah pedesaan di Indonesia masih kerap terkendala oleh kondisi jembatan yang rusak atau tidak layak digunakan. Keberadaan jembatan yang aman dan memadai sangat penting karena menjadi jalur utama mobilitas siswa menuju sekolah. Kerusakan jembatan tidak hanya menimbulkan risiko keselamatan, tetapi juga berdampak pada tingkat kehadiran siswa serta mengurangi kelancaran proses belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur jembatan memiliki peran vital dalam mendukung pemerataan layanan pendidikan dan memastikan terpenuhinya hak belajar bagi seluruh warga negara

Salah satu persoalan yang sering dihadapi peserta didik di wilayah pedesaan adalah kondisi jembatan yang rusak atau tidak layak digunakan. Jembatan memiliki fungsi sebagai penghubung akses menuju sekolah, sehingga kerusakannya tidak hanya menimbulkan risiko keselamatan, tetapi juga

menghambat mobilitas siswa. Dampak yang muncul antara lain keterlambatan, penurunan kehadiran, hingga berkurangnya konsentrasi belajar karena rasa cemas melewati jalur berbahaya (Rosyidah et al., 2024). Fakta ini menegaskan bahwa keberadaan jembatan yang memadai merupakan bagian penting dari infrastruktur pendidikan yang harus diperhatikan negara untuk menjamin pemerataan layanan pendidikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur, khususnya jembatan sebagai sarana penunjang pendidikan, memiliki hubungan erat dengan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Infrastruktur yang memadai bukan hanya mempermudah akses siswa menuju sekolah, tetapi juga menjadi indikator terpenuhinya hak masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang aman, layak, dan merata. Sebaliknya, jika infrastruktur pendukung dibiarkan rusak, maka kualitas layanan publik pendidikan akan menurun karena akses belajar menjadi terbatas, risiko keselamatan meningkat, dan hak peserta didik atas pendidikan yang setara tidak terpenuhi.

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung dengan luas wilayah sekitar 4.654,98 km², yang terdiri dari 2.855,46 km² daratan dan 1.799,5 km² perairan laut. Secara geografis, wilayah ini berada pada koordinat 104°18'–105°12' BT dan 5°05'–5°56' LS dengan kondisi topografi beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan dengan elevasi mencapai 2.115 meter di atas permukaan laut. Tanggamus juga memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 200 km di Teluk Semangka (Data BPS Kabupaten Tanggamus 2020). Karakter geografis ini membuat banyak desa berada di daerah terpencil dengan akses mobilitas yang terbatas, sehingga jembatan menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan masyarakat dalam beraktivitas, termasuk siswa yang harus menempuh perjalanan menuju sekolah.

Jembatan dalam pelayanan pendidikan di daerah pedesaan Tanggamus berperan lebih dari sekadar sarana transportasi. Keberadaannya menjadi jalur

utama bagi siswa untuk bersekolah, sekaligus menjadi penentu kelancaran aktivitas belajar mengajar. Infrastruktur jembatan yang aman dapat mendukung kelancaran pelayanan publik pendidikan karena siswa dapat berangkat sekolah tepat waktu dan tanpa rasa cemas. Namun, ketika jembatan dalam kondisi rusak atau tidak layak, dampaknya langsung terasa bagi pendidikan di daerah tersebut. Hal ini memperlihatkan keterkaitan erat antara kualitas infrastruktur dengan terpenuhinya hak masyarakat terhadap layanan pendidikan yang setara dan aman.

Kenyataan tersebut semakin diperkuat dengan adanya dalam kasus jembatan rusak di Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, yang sempat viral di media sosial. Video yang tersebar menunjukkan pelajar SMP harus menyeberangi jembatan dengan kondisi sangat berbahaya: papan kayu lapuk hilang, rangka jembatan berkarat, dan siswa hanya berpijak pada sling besi untuk sampai ke sekolah. Fenomena ini mencerminkan bagaimana kerusakan infrastruktur dapat menghambat pemerataan pendidikan sekaligus membahayakan keselamatan anak-anak. Publik menilai kasus ini sebagai cermin lemahnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan sarana pendidikan yang layak. Meskipun akhirnya pemerintah daerah dan provinsi segera merespons dengan rencana pembangunan jembatan darurat, kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat di wilayah terpencil.

Permasalahan utama yang muncul akibat kerusakan jembatan di Kabupaten Tanggamus adalah meningkatnya risiko keselamatan bagi peserta didik. Kondisi jembatan yang rapuh, berlubang, serta hanya ditopang tali sling besi menimbulkan potensi bahaya serius yang dapat mengancam jiwa. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketakutan dan kecemasan setiap kali menyeberang, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis peserta didik yang pada akhirnya dapat memengaruhi konsentrasi dan kesiapan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh sebab itu, persoalan infrastruktur yang rusak memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan pendidikan.

Kerusakan jembatan juga memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan pendidikan. Hambatan akses membuat peserta didik sering kali terlambat masuk sekolah, bahkan tidak jarang absen terutama pada saat musim hujan atau kondisi jembatan semakin memburuk. Tingginya tingkat keterlambatan dan absensi berpotensi menurunkan motivasi belajar, mengurangi efektivitas pembelajaran, serta memengaruhi capaian akademik. Jika dibiarkan berlarut, permasalahan ini dapat meningkatkan kemungkinan peserta didik putus sekolah karena kesulitan akses menuju lembaga pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana prasarana pendukung yang memadai.

Permasalahan ini turut menjadi persoalan bagaimana persepsi masyarakat dan peserta didik terhadap peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik di bidang pendidikan. Lambannya penanganan terhadap kasus jembatan rusak menimbulkan penilaian bahwa pemerintah belum memberikan perhatian yang optimal terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses pendidikan yang aman dan layak. Bagi peserta didik, kondisi ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah yang seharusnya menjamin hak konstitusional mereka. Persepsi negatif ini penting untuk diperhatikan karena tingkat kepercayaan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, permasalahan jembatan rusak tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan psikologis yang berimplikasi luas terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Pelayanan publik memiliki fungsi penting dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat, termasuk hak atas pendidikan yang aman, layak, dan merata (Haryati et al., 2024). Penyediaan infrastruktur pendukung berupa jalan dan jembatan menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut karena berperan langsung dalam kelancaran akses peserta didik menuju sekolah.

Kebijakan pemerintah telah menekankan peningkatan mutu serta pemerataan layanan pendidikan, namun realisasinya sangat bergantung pada ketersediaan sarana fisik yang memadai. Ketika akses dasar berupa jembatan masih dalam kondisi rusak, maka janji pemerataan pendidikan berpotensi tidak tercapai dan hanya berhenti pada tataran kebijakan .

Kondisi di Kabupaten Tanggamus memperlihatkan kesenjangan nyata antara komitmen pemerintah dengan situasi yang dialami masyarakat. Jembatan yang rusak dan dibiarkan tanpa perbaikan menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan pendidikan di daerah terpencil. Keadaan ini menimbulkan ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang aman dengan kondisi infrastruktur yang tersedia. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemerataan dan keadilan, sehingga penyelenggaraan pendidikan masih menghadapi hambatan serius terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil.

Penelitian tentang persepsi pelajar dan masyarakat adalah hal yang penting untuk dilakukan dalam permasalahan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tanggamus. Suara dari pihak yang secara langsung terdampak, baik peserta didik maupun masyarakat sekitar, dapat memberikan gambaran yang lebih nyata tentang bagaimana kondisi jembatan rusak memengaruhi akses serta kualitas pendidikan. Penelitian semacam ini tidak hanya memperlihatkan aspek fisik infrastruktur, melainkan juga menggali dimensi sosial, psikologis, dan kultural yang dialami masyarakat dalam menghadapi keterbatasan pelayanan publik. Dengan demikian, analisis persepsi menjadi sarana untuk memastikan bahwa pengalaman masyarakat tidak terabaikan dalam evaluasi kebijakan publik.

Hasil penelitian mengenai persepsi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah strategis yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Data yang diperoleh

dapat berfungsi sebagai masukan konkret bagi perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan, sehingga penyediaan layanan publik tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Keberadaan penelitian ini juga berperan dalam mendorong pemerintah untuk memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan dalam pelayanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang selama ini masih menghadapi hambatan serius akibat keterbatasan infrastruktur dasar.

Secara teoritis, infrastruktur pendidikan yang memadai diyakini sebagai prasyarat penting dalam menjamin akses dan pemerataan pendidikan, sebab sarana fisik menjadi faktor pendukung utama keberlangsungan proses belajar. Secara empiris, Kerusakan atau keterbatasan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan di daerah pedesaan, berdampak signifikan terhadap keterlambatan, absensi, bahkan risiko putus sekolah bagi peserta didik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan publik di bidang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas infrastruktur yang ada, karena persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah banyak ditentukan oleh sejauh mana kebutuhan dasar mereka difasilitasi (Said, 2022). Berdasarkan hal tersebut, penelitian tentang persepsi pelajar dan masyarakat terhadap infrastruktur menjadi penting untuk memahami keterkaitan antara aspek fisik dan penerimaan sosial dalam penyelenggaraan pelayanan publik pendidikan.

Berdasarkan landasan teoritis dan empiris tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap paling tepat untuk menggali lebih jauh persepsi pelajar dan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur pendidikan. Melalui kualitatif, peneliti dapat menangkap pengalaman subjektif, pandangan, serta makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap keberadaan jembatan sebagai sarana penunjang akses sekolah. Pendekatan ini juga memungkinkan diperolehnya data yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai bagaimana hambatan infrastruktur berimplikasi pada pelayanan publik pendidikan, sehingga hasil penelitian

tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu merefleksikan realitas sosial yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Tanggamus.

Penelitian terdahulu banyak membahas hubungan infrastruktur dengan pendidikan, namun kajian yang secara khusus menempatkan jembatan rusak sebagai bagian dari pelayanan publik pendidikan masih sangat terbatas. Suharta (2021), menemukan bahwa keterbatasan pembangunan jalan di wilayah terpencil berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah, karena peserta didik kesulitan menjangkau lembaga pendidikan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada rendahnya angka partisipasi sekolah, tetapi juga memperbesar kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan akses jalan yang layak merupakan faktor penentu keberlangsungan pendidikan, sekaligus menjadi indikator penting dalam mewujudkan pemerataan layanan publik di bidang pendidikan.

Penelitian dari Susanti & Sabardila (2023), yang dilakukan di Desa Tlobo dan Karang Sari juga memperlihatkan bahwa pembangunan jalan dan jembatan memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, meskipun fokusnya belum diarahkan pada aspek pendidikan secara khusus. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang bagi penelitian ini, yakni untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana kondisi jembatan, khususnya ketika mengalami kerusakan, memengaruhi persepsi masyarakat dan pelajar terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan di Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis persepsi pelajar dan masyarakat mengenai keberadaan jembatan rusak sebagai bagian dari infrastruktur pendukung pendidikan. Dengan judul *“Analisis Persepsi Pelajar dan Masyarakat Terhadap Jembatan Rusak Sebagai Infrastruktur Pendukung Pendidikan dan Dampaknya Bagi Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Tanggamus”* Fokus ini dipilih untuk melihat sejauh

mana kondisi jembatan memengaruhi aksesibilitas siswa menuju sekolah serta bagaimana situasi tersebut berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini juga berupaya menggali pandangan masyarakat mengenai peran pemerintah dalam menanggapi persoalan infrastruktur yang rusak, mengidentifikasi hambatan yang dirasakan secara langsung oleh pelajar, serta menelaah konsekuensi sosial dan psikologis yang muncul akibat keterbatasan akses tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang mengenai keterkaitan antara kondisi infrastruktur, pengalaman masyarakat, dan mutu pelayanan pendidikan, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena empiris dan kajian teoritis yang telah dijelaskan, kerusakan jembatan di Kabupaten Tanggamus tidak hanya mengancam keselamatan pelajar, tetapi juga berdampak pada aksesibilitas pendidikan serta membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen pemerintah dalam pemerataan pendidikan dengan realitas infrastruktur di lapangan. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi pelajar dan masyarakat terhadap kondisi jembatan rusak sebagai infrastruktur pendukung pendidikan di Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana dampak kondisi jembatan rusak tersebut terhadap kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Tanggamus?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami persepsi pelajar dan masyarakat terhadap jembatan rusak di Kabupaten Tanggamus serta

dampaknya terhadap kualitas pelayanan pendidikan seperti akses, keselamatan, dan kelancaran proses belajar mengajar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Manfaat yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang hubungan antara infrastruktur pendukung pendidikan, khususnya jembatan, dengan kualitas pelayanan pendidikan di daerah pedesaan. Jawaban atas rumusan masalah akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori administrasi publik, terutama dalam melihat keterkaitan antara penyediaan sarana prasarana dasar dengan persepsi masyarakat serta dampaknya terhadap pemerataan pendidikan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas aspek sosial, psikologis, dan kebijakan publik terkait pendidikan di daerah terpencil.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus serta pihak terkait lainnya dalam upaya memperbaiki dan membangun infrastruktur pendukung pendidikan, terutama jembatan yang menjadi jalur utama pelajar menuju sekolah. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendorong percepatan pembangunan sarana transportasi yang aman, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan organisasi sosial dalam menyuarakan aspirasi terkait pentingnya infrastruktur pendidikan yang layak demi keberlangsungan proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, A. R., Hudnah, Oktarina, H., Angkur, M. F. M., Yusup, M., Yuningsih, R. L., Sriharyati, S., Suwandi, Nuraeni, L., & Syukur, T. A. (2024). *Kesenjangan Pendidikan Perbedaan Akses dan Kualitas Pendidikan di Berbagai Daerah*. Eurika Media Aksara. Purbalingga.
- Fadillah, R., Desmaryani, R., & Lestari, A. (2025). Analisis Ketimpangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Daerah Pedesaan. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 3(2), 217–225.
- Haryati, E., Rosmiati, M., Mustofa, A., Chaidir, J., Djajasinga, N. D., Muda, L. S., Suacana, I. W. G., & Vanchapo, A. R. (2024). *Pengantar Pelayanan Publik*. CV Rey Media Grafika. Batam.
- Juro, A., Sukma, F., Lubis, H., & Zahra, L. (2025). Dampak Infrastruktur Terhadap Pendidikan Di Perkampungan (Studi Kasus Di Desa Sugarang Bayu , Kecamatan Bandar , Kabupaten Simalungun) Dampak Infrastruktur Terhadap Pendidikan Di Perkampungan (Studi Kasus Di. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 6957–6964.
- Mahardhani, A. J. (2025). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Administrasi Publik Teori Dan Praktik* (Vol. 2). PT Media Penerbit Indonesia. Medan.
- Nurbaya, Fikri, A., Salong, A., Rifai, M., Tati, A. D. R., Syukur, T. A., Zahro, I. M. F., Suhartono, & Dewi, A. E. R. (2024). *Pengantar Pendidikan*. CV. Pustaka Inspirasi Minang. Padang.
- Palguna, I. D. G., & Dwi Atmaja, B. K. (2023). Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 350–370.
- Rosyidah, S. A., H, I. W., Ismanafi, A. Z. Z., Putra, A., Khoirudin, S., & Soeprapto, W. P. (2024). Pentingnya Infrastruktur Jalan Bagi Aksesibilitas Ekonomi Dan Sosial Terhadap Warga Desa Sambongrejo Dan Desa Sendangagung Bojonegoro Wahjoe Poernomo Soeprapto 6. *Jurnal Media Akademik*, 2(10), 1–19.
- Said, A. (2022). Perceived Public Service Quality And Accessibility For Regional Index Development: The Case Of City Of Mojokerto-Indonesia. *Habitat*, 33(1), 44–54.

Suharta, I. M. (2021). Road Infrastructure Inequality And Dropout Rates in Isolated Areas: Tracking The Indonesian literature. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2898–2907.

Susanti, P. D., & Sabardila, A. (2023). Pembangunan Jalan Dan Jembatan Penghubung Akibat Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo Dan Karang Sari. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 5(1), 57–71.